



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 63
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pergeseran Anggaran antar rincian obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, terdapat rincian obyek kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2019 yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya yang diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan surat:
1. Surat Inspektur Kota Makassar Nomor: 0789/Insp/900/III/2019, tanggal 13 Maret 2019, Perihal: Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA. 2019 (Parsial) Rekening Belanja TA. 2019;
 2. Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor : 900/115/Kesra/III/2019, tanggal 18 Maret 2019, Perihal: Pergeseran Rekening Belanja TA. 2019;
 3. Surat Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Nomor: 900/434/BPKAD/IV/2019, Tanggal 5 April 2019 Perihal: Usulan Pergeseran Anggaran;
 4. Surat Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor : 900/285/Sekt.DPRD/III/2019, tanggal 27 Maret 2019, Perihal: Usulan Pergeseran Anggaran;
- sehingga Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditinjau untuk dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2018);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 65).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, merubah Belanja Langsung Pada Inspektorat, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 12 April 2019

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 12 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 29

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Makassar
 NOMOR : 29 Tahun 2019
 TANGGAL : 12 April 2019

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02 - Keuangan
 ORGANISASI : 3.02.01 - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
									SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.02	3.02.01	00	00	4				PENDAPATAN DAERAH	2.527.914.054.000,00	2.527.914.054.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1			Pendapatan Asli Daerah	77.363.986.000,00	77.363.986.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	46.645.052.000,00	46.645.052.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	3	01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah	40.157.221.000,00	40.157.221.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	3	02	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah	6.382.231.000,00	6.382.231.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	3	03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta	105.600.000,00	105.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	30.718.934.000,00	30.718.934.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4	01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	345.934.000,00	345.934.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4	02	Penerimaan Jasa Giro	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4	03	Pendapatan Bunga deposito	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4	04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4	06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	273.000.000,00	273.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4	10	Pendapatan Dari Pengembalian	9.160.000.000,00	9.160.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4	14	Lain-lain PAD yang sah lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2			Dana Perimbangan	1.911.094.669.000,00	1.911.094.669.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	1		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	111.573.264.000,00	111.573.264.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	1	01	Bagi Hasil Pajak	104.237.373.000,00	104.237.373.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	1	02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.335.891.000,00	7.335.891.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	2		Dana Alokasi Umum	1.389.864.807.000,00	1.389.864.807.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	2	01	Dana Alokasi Umum	1.389.864.807.000,00	1.389.864.807.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	3		Dana Alokasi Khusus	409.656.598.000,00	409.656.598.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	3	01	Dana Alokasi Khusus	140.220.105.000,00	140.220.105.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	3	02	Dana Alokasi Khusus non fisik	269.436.493.000,00	269.436.493.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3			Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	539.455.399.000,00	539.455.399.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	1		Pendapatan Hibah	132.804.600.000,00	132.804.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	1	06	Pendapatan Hibah Dana BOS	132.804.600.000,00	132.804.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	3		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	324.416.000.000,00	324.416.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	3	01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	324.416.000.000,00	324.416.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	4		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.831.999.000,00	62.831.999.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	4	01	Dana Penyesuaian	62.831.999.000,00	62.831.999.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	5		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.402.800.000,00	19.402.800.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	5	01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	19.402.800.000,00	19.402.800.000,00	-	-	Tidak Berubah
								JUMLAH PENDAPATAN	2.527.914.054.000,00	2.527.914.054.000,00	-	-	Tidak Berubah

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
								SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.02	3.02.01	00	00	5			BELANJA DAERAH	109.393.684.799,00	109.393.684.799,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1		Belanja Tidak Langsung	69.998.684.799,00	69.998.684.799,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	Belanja Pegawai	3.282.746.000,00	3.282.746.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1 01	Gaji Pokok dan Tunjangan - ASN	3.282.746.000,00	3.282.746.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	4	Belanja Hibah	58.958.500.000,00	58.958.500.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	4 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	36.595.000.000,00	36.595.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	4 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	6.755.000.000,00	6.755.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	4 08	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	11.581.200.000,00	11.581.200.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	4 09	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	4.027.300.000,00	4.027.300.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	5	Belanja Bantuan Sosial	3.115.000.000,00	3.115.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	5 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	3.115.000.000,00	3.115.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.094.538.000,00	1.094.538.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	7 05	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	1.094.538.000,00	1.094.538.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	8	Belanja Tidak Terduga	3.547.900.799,00	3.547.900.799,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	8 01	Belanja Tidak Terduga	3.547.900.799,00	3.547.900.799,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	2		Belanja Langsung	39.395.000.000,00	39.395.000.000,00	-	-	Tidak Bertambah
3.02	3.02.01	00	00	5	2	1	Belanja Pegawai	12.693.675.000,00	12.693.675.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	24.642.325.000,00	24.642.325.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	2	3	Belanja Modal	2.059.000.000,00	2.059.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.173.392.000,00	3.173.392.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02					Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	3.721.720.000,00	3.721.720.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02	14				Pengadaan alat kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02	15				Pengadaan alat rumah tangga	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02	16				Pengadaan komputer	2.007.000.000,00	2.007.000.000,00	-	-	Tidak Bertambah
3.02	3.02.01	02	16	5	2	3	Belanja Modal	2.007.000.000,00	2.007.000.000,00	-	-	Tidak Bertambah
3.02	3.02.01	02	16	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.507.000.000,00	1.537.000.000,00	30.000.000,00	1,99	
3.02	3.02.01	02	16	5	2	3 12 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	696.000.000,00	435.000.000,00	(261.000.000,00)	(37,50)	Dikurangi Sebesar Rp. 261.000.000,00
3.02	3.02.01	02	16	5	2	3 12 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	190.000.000,00	326.000.000,00	136.000.000,00	71,58	Bertambah Sebesar Rp. 136.000.000,00
3.02	3.02.01	02	16	5	2	3 12 04	Belanja modal Pengadaan printer	23.000.000,00	89.500.000,00	66.500.000,00	289,13	Bertambah Sebesar Rp. 66.500.000,00
3.02	3.02.01	02	16	5	2	3 12 05	Belanja modal Pengadaan scanner	26.000.000,00	101.000.000,00	75.000.000,00	288,46	Bertambah Sebesar Rp. 75.000.000,00
3.02	3.02.01	02	16	5	2	3 12 06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02	16	5	2	3 12 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02	16	5	2	3 12 09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, speaker)	-	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 13.500.000,00
3.02	3.02.01	02	16	5	2	3 12 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02	16	5	2	3 33	Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud	500.000.000,00	470.000.000,00	(30.000.000,00)	(6,00)	
3.02	3.02.01	02	16	5	2	3 33 02	Belanja modal Pengadaan software komputer	500.000.000,00	470.000.000,00	(30.000.000,00)	(6,00)	Dikurangi Sebesar Rp. 30.000.000,00
3.02	3.02.01	02	34				Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02	35				Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor	940.400.000,00	940.400.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02	45				Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02	46				Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02	47				Pemeliharaan rutin/berkala komputer	133.000.000,00	133.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02	48				Pemeliharaan rutin/berkala meja dan kursi kerja/rapat	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	Tidak Berubah

KODE REKENING					URAIAN		JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1					2		3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.02	3.02.01	02	55		Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja		100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02	67		Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi		47.000.000,00	47.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02	68		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		18.320.000,00	18.320.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02	75		Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)		225.000.000,00	225.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		126.200.000,00	126.200.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	04			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		514.400.000,00	514.400.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	05			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1.743.200.000,00	1.743.200.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	09			Program anggaran keuangan daerah		10.571.958.000,00	10.571.958.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	10			Program penataan aset daerah		9.892.190.000,00	9.892.190.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	11			Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah		5.581.500.000,00	5.581.500.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12			Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		4.070.440.000,00	4.070.440.000,00	-	-	Tidak Bertambah
3.02	3.02.01	12	01		Pemutakhiran data neraca SKPD		61.200.000,00	61.200.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	02		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		64.000.000,00	64.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	03		Penatausahaan pinjaman pemerintah kota makassar		124.460.000,00	124.460.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	04		Penatausahaan laporan pertanggungjawaban SKPD		179.730.000,00	179.730.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	05		Penatausahaan unit akuntansi tugas pembantuan		116.000.000,00	116.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	06		Pelaksanaan eAudit		68.200.000,00	68.200.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	07		Pengumpulan data ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		265.800.000,00	265.800.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	08		Penyusunan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		275.700.000,00	275.700.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	09		Pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		205.500.000,00	205.500.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	10		Penyelesaian ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		351.800.000,00	351.800.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	11		Penyusunan ranper walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		146.000.000,00	146.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	12		Penyelesaian ranper walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		32.600.000,00	32.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	13		Penataan dan pendataan arsip daerah		212.300.000,00	212.300.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	14		Majelis pertimbangan TGR dan sekretariat majelis		321.100.000,00	321.100.000,00	-	-	Tidak Bertambah
3.02	3.02.01	12	14	5 2 1	Belanja Pegawai		93.600.000,00	93.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	14	5 2 1 01	Honorarium PNS		93.600.000,00	93.600.000,00	-	-	
3.02	3.02.01	12	14	5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		93.600.000,00	93.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2	Belanja Barang dan Jasa		227.500.000,00	227.500.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis		12.510.000,00	12.510.000,00	-	-	
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor		12.510.000,00	12.510.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor		4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2 03 19	Biaya transportasi		4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan		2.490.000,00	2.490.000,00	-	-	
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2 06 02	Belanja penggandaan		2.490.000,00	2.490.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman		10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat		3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2 11 05	Belanja makanan dan minuman kegiatan		7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas		135.000.000,00	105.000.000,00	(30.000.000,00)	(22,22)	
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah		135.000.000,00	105.000.000,00	(30.000.000,00)	(22,22)	Dikurangi Sebesar Rp. 30.000.000,00
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis		62.500.000,00	62.500.000,00	-	-	
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		62.500.000,00	62.500.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi		-	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
3.02	3.02.01	12	14	5 2 2 21 05	Belanja jasa konsultansi lainnya		-	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 30.000.000,00

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
								SEBELUM PERUBAHAN	SETelah PERUBAHAN	Rp.	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.02	3.02.01	12	15				Revisi peraturan daerah tentang pokokpokok pengelolaan keuangan daerah	139.700.000,00	139.700.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	16				Revisi peraturan walikota tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota makassar	133.700.000,00	133.700.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	17				Workshop bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu SKPD	108.700.000,00	108.700.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	18				Workshop akuntansi keuangan daerah berbasis akrual	976.600.000,00	976.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	19				Tim evaluasi badan layanan umum daerah kota makassar	114.350.000,00	114.350.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	20				Konsolidasi laporan keuangan perusahaan daerah	47.100.000,00	47.100.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12	21				Penatausahaan Laporan pertanggungjawaban dana non RKUD	125.900.000,00	125.900.000,00	-	-	Tidak Berubah
							JUMLAH BELANJA	109.393.684.799,00	109.393.684.799,00	-	-	Tidak Berubah
							SURPLUS	2.418.520.369.201,00	2.418.520.369.201,00	-	-	Tidak Berubah

[illegible]

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 - Pendukung
 ORGANISASI : 3.05.01 - Sekretariat Daerah

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
									SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.05	3.05.01	00	00	5				BELANJA DAERAH	266.108.821.750,00	266.108.821.750,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.01	00	00	5	1			Belanja Tidak Langsung	29.224.528.000,00	29.224.528.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	29.224.528.000,00	29.224.528.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	00	00	5	1	1	01	Gaji Pokok dan Tunjangan - ASN	19.051.876.000,00	19.051.876.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	00	00	5	1	1	02	Gaji dan Tunjangan - KDH/WKDH	172.652.000,00	172.652.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	00	00	5	1	1	05	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	00	00	5	2			Belanja Langsung	236.884.293.750,00	236.884.293.750,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.01	00	00	5	2	1		Belanja Pegawai	18.439.025.000,00	18.439.025.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	00	00	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	149.312.443.750,00	149.312.443.750,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	00	00	5	2	3		Belanja Modal	69.132.825.000,00	69.132.825.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	01						Program pelayanan administrasi perkantoran	19.424.840.000,00	19.424.840.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	02						Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	73.783.900.000,00	73.783.900.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	03						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.885.050.000,00	1.885.050.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	04						Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	17.276.200.000,00	17.276.200.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	06						Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	115.000.000,00	115.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	07						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	08						Program pembinaan pemerintahan umum	920.434.000,00	920.434.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	09						Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan	1.746.670.000,00	1.746.670.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	10						Program pengembangan otonomi daerah	1.032.896.000,00	1.032.896.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	11						Program penataan peraturan perundang-undangan	1.243.902.000,00	1.243.902.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	12						Program bantuan hukum	1.834.852.000,00	1.834.852.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	13						Program pendokumentasian produk hukum	1.521.246.000,00	1.521.246.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	14						Program penataan kelembagaan daerah	327.540.000,00	327.540.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	15						Program analisis jabatan	807.855.000,00	807.855.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	16						Program ketatalaksanaan perangkat daerah	479.096.000,00	479.096.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	18						Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik	1.625.796.000,00	1.625.796.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	19						Program Kerjasama Informasi Dengan Mass-Media	17.220.894.000,00	17.220.894.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	20						Program Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota	1.252.493.000,00	1.252.493.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	21						Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	526.613.000,00	526.613.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	22						Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa	5.289.204.650,00	5.289.204.650,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	23						Program pengembangan dampak pembangunan	2.272.790.750,00	2.272.790.750,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	24						Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah	2.013.866.800,00	2.013.866.800,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	25						Program peningkatan kerjasama antar pemerintah/lembaga	2.365.303.500,00	2.365.303.500,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	26						Program peningkatan kerjasama investasi	594.902.000,00	594.902.000,00	-	-	Tidak Berubah

KODE REKENING					URAIAN		JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1					2		3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.05	3.05.01	27			Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama		379.056.000,00	379.056.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	28			Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas		15.568.450.000,00	15.568.450.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	29			Program Pelayanan Kerumahtanggaan dan Urusan Dalam		25.260.970.000,00	25.260.970.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	30			Program Pelayanan Keprotokuleran dan Tamu Pemerintah Daerah		7.279.476.420,00	7.279.476.420,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	31			Program pelayanan mess pemda kota makassar		2.202.423.580,00	2.202.423.580,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32			Program pembinaan mental spiritual		12.857.082.640,00	12.857.082.640,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	01		Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan		305.159.960,00	305.159.960,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	02		Pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji		237.194.700,00	237.194.700,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	03		Peningkatan kesejahteraan imam rawatib dan guru mengaji		4.824.606.600,00	4.824.606.600,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	04		Peningkatan kesejahteraan pengurus jenazah muslim		1.644.170.950,00	1.644.170.950,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	05		Peningkatan kesejahteraan guru sekolah minggu kristen dan hindu		613.896.250,00	613.896.250,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	06		Pembinaan muballigh		128.544.010,00	128.544.010,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	07		Safari Ramadhan & Amalia Ramadhan		934.266.000,00	934.266.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	08		Dzikir dan Doa bersama		323.002.250,00	323.002.250,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	09		Pembinaan Baca Tulis Al-Quran		105.816.000,00	105.816.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	10		Peningkatan kesejahteraan Muballigh		228.379.800,00	228.379.800,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	11		Pembinaan qori/qoriah, hafidz/hafidzah, mufassir/mufassirah Kota Makassar		99.990.250,00	99.990.250,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12		Pengiriman kafilah STQ tingkat provinsi		1.216.240.950,00	1.216.240.950,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	1	25.900.000,00	25.900.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	1	25.900.000,00	25.900.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	1	25.900.000,00	25.900.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	1.190.340.950,00	1.190.340.950,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	11.252.950,00	11.252.950,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	7.502.950,00	7.502.950,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	256.500.000,00	256.500.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	100.000,00	100.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	248.400.000,00	248.400.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	1.013.000,00	1.013.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	1.013.000,00	1.013.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	79.200.000,00	79.200.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	79.200.000,00	79.200.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	55.375.000,00	55.375.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	55.375.000,00	55.375.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 100.000.000,00
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	500.000.000,00	400.000.000,00	(100.000.000,00)	(20,00)	Dikurangi Sebesar Rp. 100.000.000,00
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	267.000.000,00	267.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	12	5	2	2	267.000.000,00	267.000.000,00	-	-	Tidak Berubah

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1						2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.05	3.05.01	32	13			Pembinaan dan pengembangan mental spiritual kemasyarakatan	1.709.190.850,00	1.709.190.850,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	32	14			Peningkatan kesejahteraan penghafal alquran Kota Makassar	486.624.070,00	486.624.070,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	33				Program pembinaan dan pengembangan rumah ibadah	409.869.500,00	409.869.500,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	34				Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan	1.033.047.860,00	1.033.047.860,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	35				Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan	380.757.000,00	380.757.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	36				Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	7.824.866.050,00	7.824.866.050,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.01	37				Program peningkatan kapasitas pemberdayaan dan perkembangan kelurahan	6.626.950.000,00	6.626.950.000,00	-	-	Tidak Berubah

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 - Pendukung
 ORGANISASI : 3.05.02 - Sekretariat DPRD

KODE REKENING								Jumlah (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
								SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1								3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.05	3.05.02	00	00	5				155.962.348.880,00	155.962.348.880,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.02	00	00	5	1			40.644.720.000,00	40.644.720.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	00	00	5	1	1		40.644.720.000,00	40.644.720.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	00	00	5	1	1	01	4.989.171.000,00	4.989.171.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	00	00	5	1	1	03	26.833.902.000,00	26.833.902.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	00	00	5	1	1	04	1.647.000,00	1.647.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	00	00	5	1	1	05	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	00	00	5	2			115.317.628.880,00	115.317.628.880,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.02	00	00	5	2	1		3.669.650.000,00	3.669.650.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	00	00	5	2	2		103.508.743.880,00	103.508.743.880,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	00	00	5	2	3		8.139.235.000,00	8.139.235.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	01						32.280.233.130,00	32.280.233.130,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	02						16.968.275.750,00	16.968.275.750,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	03						2.478.606.800,00	2.478.606.800,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	04						17.450.980.000,00	17.450.980.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	05						604.465.850,00	604.465.850,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	19						220.027.000,00	220.027.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39						45.315.040.350,00	45.315.040.350,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.02	39	01					10.133.289.300,00	10.133.289.300,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	02					504.321.000,00	504.321.000,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.02	39	02	5	2	1		171.900.000,00	171.900.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	02	5	2	1	01	171.900.000,00	171.900.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	02	5	2	1	01	171.900.000,00	171.900.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	02	5	2	2		332.421.000,00	332.421.000,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.02	39	02	5	2	2	01	4.916.000,00	4.916.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	02	5	2	2	01	4.916.000,00	4.916.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	02	5	2	2	03	204.000.000,00	204.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	02	5	2	2	03	84.000.000,00	84.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	02	5	2	2	03	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	02	5	2	2	06	29.645.000,00	29.645.000,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.02	39	02	5	2	2	06	29.645.000,00	29.645.000,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.02	39	02	5	2	2	11	93.860.000,00	93.860.000,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.02	39	02	5	2	2	11	93.860.000,00	93.860.000,00	-	-	Tidak Berubah

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
									SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.05	3.05.02	39	03					Rapat-rapat Paripurna	2.367.350.000,00	2.367.350.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	04					Kegiatan Reses	9.178.300.000,00	9.178.300.000,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.02	39	04	5	2	1		Belanja Pegawai	87.300.000,00	87.300.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	04	5	2	1	01	Honorarium PNS	87.300.000,00	87.300.000,00	-	-	
3.05	3.05.02	39	04	5	2	1	01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.300.000,00	87.300.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	04	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	9.091.000.000,00	9.091.000.000,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.02	39	04	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	91.000.000,00	91.000.000,00	-	-	
3.05	3.05.02	39	04	5	2	2	03 31	Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan	91.000.000,00	91.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	04	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000.000,00	1.700.000.000,00	700.000.000,00	70,00	
3.05	3.05.02	39	04	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	280.000.000,00	800.000.000,00	520.000.000,00	185,71	Bertambah Sebesar Rp. 520.000.000,00
3.05	3.05.02	39	04	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	04	5	2	2	10 07	Belanja sewa sound system	120.000.000,00	300.000.000,00	180.000.000,00	150,00	Bertambah Sebesar Rp. 180.000.000,00
3.05	3.05.02	39	04	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000.000,00	7.300.000.000,00	(700.000.000,00)	(8,75)	
3.05	3.05.02	39	04	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000.000,00	7.300.000.000,00	(700.000.000,00)	(8,75)	Dikurangi Sebesar Rp. 700.000.000,00
3.05	3.05.02	39	05					Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	763.000.000,00	763.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	06					Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	3.910.000.000,00	3.910.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	07					Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Dan Staff	10.880.400.000,00	10.880.400.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	08					Pembahasan Perda Inisiatif DPRD	2.390.223.500,00	2.390.223.500,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	09					Kegiatan Komisi	1.203.650.000,00	1.203.650.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	10					Kegiatan Fraksi DPRD	508.741.950,00	508.741.950,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	11					Kemitraan Anggota DPRD dan Masyarakat	1.535.759.000,00	1.535.759.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	12					Diskusi publik masalah aktual kemasyarakatan	1.280.615.000,00	1.280.615.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.02	39	13					Penerimaan aspirasi/unjuk rasa masyarakat	659.390.600,00	659.390.600,00	-	-	Tidak Berubah
(DEFISIT)									(155.962.348.880,00)	(155.962.348.880,00)	-	-	Tidak Berubah

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 - Pendukung
 ORGANISASI : 3.05.03 - Inspektorat Daerah

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
								SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.05	3.05.03	00	00	5			BELANJA DAERAH	20.455.666.830,00	20.455.666.830,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.03	00	00	5	1		Belanja Tidak Langsung	4.996.721.000,00	4.996.721.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	00	00	5	1	1	Belanja Pegawai	4.996.721.000,00	4.996.721.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	00	00	5	1	1	Gaji Pokok dan Tunjangan - ASN	4.996.721.000,00	4.996.721.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	00	00	5	2		Belanja Langsung	15.458.945.830,00	15.458.945.830,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.03	00	00	5	2	1	Belanja Pegawai	7.834.560.200,00	7.834.560.200,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	00	00	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	6.945.385.630,00	6.945.385.630,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	00	00	5	2	3	Belanja Modal	679.000.000,00	679.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.968.589.480,00	1.968.589.480,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	02					Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.393.568.000,00	1.393.568.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	03					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	76.000.000,00	76.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	04					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.399.811.000,00	2.399.811.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	05					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	481.300.000,00	481.300.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40					Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	8.932.259.350,00	8.932.259.350,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.03	40	01				Pelaksanaan pengawasan internal secara Komprehensif pada Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar	2.159.670.700,00	2.159.670.700,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	02				Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	1.652.347.500,00	1.652.347.500,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.03	40	02	5	2	1	Belanja Pegawai	1.382.700.000,00	1.382.700.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	02	5	2	1	Honorarium PNS	1.382.700.000,00	1.382.700.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	02	5	2	1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.382.700.000,00	1.382.700.000,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.03	40	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	269.647.500,00	269.647.500,00	-	-	Tidak Bertambah
3.05	3.05.03	40	02	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis	52.600.000,00	29.100.000,00	(23.500.000,00)	(44,68)	Dikurangi Sebesar Rp. 23.500.000,00
3.05	3.05.03	40	02	5	2	2	Belanja alat tulis kantor	52.600.000,00	29.100.000,00	(23.500.000,00)	(44,68)	Dikurangi Sebesar Rp. 23.500.000,00
3.05	3.05.03	40	02	5	2	2	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	165.000.000,00	69.000.000,00	71,88	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	02	5	2	2	Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan	96.000.000,00	96.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	02	5	2	2	Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan	-	69.000.000,00	69.000.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 69.000.000,00
3.05	3.05.03	40	02	5	2	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.547.500,00	10.547.500,00	(8.000.000,00)	(43,13)	Dikurangi Sebesar Rp. 3.373.000,00
3.05	3.05.03	40	02	5	2	2	Belanja cetak	11.047.500,00	7.674.500,00	(3.373.000,00)	(30,53)	Dikurangi Sebesar Rp. 3.373.000,00
3.05	3.05.03	40	02	5	2	2	Belanja penggandaan	7.500.000,00	2.873.000,00	(4.627.000,00)	(61,69)	Dikurangi Sebesar Rp. 4.627.000,00
3.05	3.05.03	40	02	5	2	2	Belanja Perjalanan Dinas	102.500.000,00	65.500.000,00	(37.500.000,00)	(36,59)	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	02	5	2	2	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	02	5	2	2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.500.000,00	30.000.000,00	(37.500.000,00)	(55,56)	Dikurangi Sebesar Rp. 37.500.000,00

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1					2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.05	3.05.03	40	03		Pengelolaan DataBase Hasil Pengawasan	131.033.000,00	131.033.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	04		Pemutakhiran data temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat kota Makassar	248.201.300,00	248.201.300,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	05		Monitoring Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Lingkup Pemerintah Kota Makassar	86.872.000,00	86.872.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	06		Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	200.255.000,00	200.255.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	07		Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah Hasil Temuan Aparat Pengawasan Internal	32.785.000,00	32.785.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	08		Review Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	59.663.000,00	59.663.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	09		Pemantauan dan Pemeriksaan Kegiatan Belanja Modal SKPD Lingkup Kota Makassar	216.707.500,00	216.707.500,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	10		Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	159.061.380,00	159.061.380,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	11		Pemeriksaan Dana BOS	2.302.166.000,00	2.302.166.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	12		Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi	534.201.000,00	534.201.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	14		Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	165.155.000,00	165.155.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	15		Monitoring dan Evaluasi atas Pencatatan Aset Hasil Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Dana APBD dan non APBD	56.062.000,00	56.062.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	16		Monitoring atas Proses Tutup Kas Akhir Tahun SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar	54.462.000,00	54.462.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	17		Monitoring atas Pencatatan Saldo Persediaan Akhir Tahun SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar	54.326.520,00	54.326.520,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	18		Inventarisasi wajib LP2P PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	19		Evaluasi LAKIP SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar	233.867.650,00	233.867.650,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	20		Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	74.298.000,00	74.298.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	21		Inventarisasi Hasil Temuan Pemeriksaan	39.740.000,00	39.740.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	22		Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	54.186.000,00	54.186.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	24		Maturitas SPIP	58.813.000,00	58.813.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	25		Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	35.967.000,00	35.967.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	26		Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	55.533.000,00	55.533.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	27		Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Reviu RPJMD	22.799.500,00	22.799.500,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	28		Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	87.486.300,00	87.486.300,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	29		Penyelesaian Hasil Temuan Ombudsman RI	53.080.000,00	53.080.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	31		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	25.268.000,00	25.268.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	40	35		Konsultasi Pengawasan Internal	62.052.000,00	62.052.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.05	3.05.03	41			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	207.418.000,00	207.418.000,00	-	-	Tidak Berubah
					JUMLAH BELANJA	20.455.666.830,00	20.455.666.830,00	-	-	
					(DEFISIT)	(20.455.666.830,00)	(20.455.666.830,00)	-	-	

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO